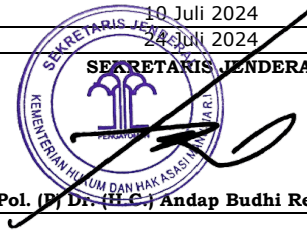
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR SOP	HH.06.02.02.06
TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2016
TANGGAL REVISI	10 Juli 2024
TANGGAL EFEKTIF	24 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.**
NAMA SOP :	**PEMENUHAN PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-RB**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 900).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Memahami tugas dan fungsi bagian reformasi birokrasi
3. mampu menggunakan aplikasi e-reformasi birokrasi (E-RB)

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi
2. SOP Pengusulan Sarker Berpredikat WBK/WBBM
3. SOP Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Tata Naskah Dinas
6. ATK
7. Ruang Rapat

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pemenuhan Pelaporan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-RB tidak berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMENUHAN PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI APLIKASI E-RB

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian RB	Unit Eselon I	Kantor Wilyah	UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat pemenuhan pelaporan Reformasi Birokrasi untuk di disposisikan ke Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	Mulai				Permen PAN dan RB No 3 Tahun 2023	15 menit	disposisi	
2	Membuat surat pemenuhan pelaporan Reformasi Birokrasi untuk di disposisikan ke UPT					Perpres No. 81 Tahun 2010.	15 menit	disposisi	
3	melakukan pemenuhan Pelaporan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-rb					disposisi	15 menit	disposisi	
4	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Selesai				bahan modul, disposisi	1 hari	disposisi	